

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu segmen perekonomian Indonesia dan sangat penting bagi kelanjutan ekspansi perekonomian negara. UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa mempunyai kemampuan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak (cukai), sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kelas bawah dan menengah serta PDB. UMKM memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika kita mempertimbangkan berbagai peran yang mereka mainkan dalam perekonomian Indonesia, termasuk menciptakan cara untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kinerja usaha kecil secara finansial. UMKM memiliki peranan penting dan esensial dalam perekonomian negara. Karena UMKM sangat dominan dalam perekonomian Indonesia, skenario ini kemungkinan besar akan terwujud (Sarfiah et al., 2019).

Madura merupakan sebuah pulau yang merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur yang mempunyai budaya khas dan kekayaan alam yang berpotensi meningkatkan perekonomian. Masyarakat lokal Madura mempunyai peluang meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui sektor pariwisata. Penopang sektor pariwisata di Madura diantaranya adalah industri UMKM, transportasi, dan akomodasi (Nasrullah et al., 2022). Berdasarkan statistik SUTAS 2018 dan SE 2016, UMKM di Pulau Madura mengalami perkembangan yang cukup baik;

terdapat 248.664 UMKM di Kabupaten Bangkalan. Berikutnya, UMKM di Kabupaten Sampang sebanyak 229.644 UMKM, Kabupaten Pamekasan sebanyak 247.269 UMKM, dan Kabupaten Sumenep sebanyak 401.210 UMKM (Kurniawan & Gitayuda, 2020). Sebagian besar UMKM di Madura merupakan usaha yang masih tradisional jika dilihat dari aspek pemasaran, sistem pengelolaan keuangan yang masih sederhana, serta memiliki akses operasional yang sangat terbatas.

UMKM merupakan usaha produktif atau kegiatan bisnis yang dimiliki perorangan atau sekelompok orang yang berperan secara langsung memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. UMKM mampu melewati masa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 silam dan mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) tahun 2021, pemilik UMKM di Indonesia berjumlah 64,2 juta. Dari banyaknya jumlah tersebut, sebesar 61,07% UMKM menyumbang pada PDB (Produk Domestik Bruto). UMKM juga dapat menekan tingkat pengangguran dengan menyerap 97% angkatan kerja dan mampu menampung hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia (Sulastri, 2022).

UMKM di Madura kerap menghadapi persoalan yang bersumber dari internal maupun eksternal. Terbatasnya akses terhadap modal usaha, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan pemasaran produk merupakan contoh umum permasalahan internal. Untuk menjalankan operasional usahanya, pelaku UMKM umumnya menggunakan modal pribadi sebagai modal usaha.

Selanjutnya, permasalahan faktor eksternal biasanya berupa keterbatasan akses terhadap modal usaha bagi pelaku UMKM pada lembaga keuangan, penyebab dari masalah ini yaitu kemampuan *self assessment* yang dimiliki pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangannya masih sangat rendah (Dahrani et al., 2022).

Suksesnya kinerja UMKM tergantung pada bagaimana cara pelaku UMKM dan karyawannya bekerja sama melakukan kegiatan untuk suatu tujuan secara terkoordinasi. Selain itu, kinerja usaha dapat dilihat dari kinerja ekonomi yang baik pula. Karena tujuan pengelolaan keuangan adalah bagaimana seseorang mengembangkan atau mengejar kekayaan, maka kinerja UMKM juga menjadi sasaran paling signifikan dalam pengelolaan keuangan (Kosim et al., 2021). Secara umum, para pelaku UMKM fokus pada perolehan keuntungan, kemudian sisa dana digunakan untuk kegiatan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pada kenyataannya, komponen kunci dari perkembangan dan keberhasilan UMKM adalah kemampuan mereka dalam mengelola uang secara kompeten.

Mengenai sulitnya akses kredit pada lembaga keuangan formal, pelaku UMKM sering kali lebih memilih menggunakan pendanaan pribadi sebagai alternatif untuk mengatasi sulitnya akses ke institusi keuangan formal. Persyaratan dan prosedur yang begitu panjang dan rumit dari pihak lembaga keuangan membuat minat masyarakat menjadi rendah, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan modal sendiri atau meminjam modal dari lembaga keuangan non formal. Selain itu, tingginya tingkat suku bunga juga

mempengaruhi minat masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan formal. Jika dilihat dari sisi risiko, penggunaan modal keluarga jauh lebih kecil risikonya jika dibandingkan dengan kredit lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa keadaan khusus untuk pembayaran kembali pinjaman tidak ada persyaratan khusus.

Jika lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara, maka pertumbuhan nasional akan meningkat. Terwujudnya sistem keuangan yang sehat dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu penandanya. Namun pada kenyataannya, akses terhadap layanan keuangan yang memadai sering kali tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan pesat industri keuangan. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi bangsa dan menjadi motor penggerakannya. Namun, jika lembaga keuangan yang ada saat ini tidak mampu mendampingi pelaku UMKM, maka aliran UMKM di seluruh perekonomian tidak akan ideal. Literasi keuangan dan inklusi keuangan sangat penting untuk para pelaku UMKM. Literasi keuangan berarti kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan secara bijak baik dalam bentuk penyaluran ke bidang sosial maupun berupa investasi (Hamzah, 2019). Tujuan dari literasi keuangan adalah untuk menjamin masyarakat umum dan UMKM dapat menggunakan barang dan jasa lembaga keuangan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memastikan tingkat literasi keuangan yang tinggi dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Pelaku UMKM membutuhkan literasi keuangan agar mampu mengambil keputusan dan membuat pertimbangan yang efektif dalam mengelola keuangan.

Hal tersebut bisa berdampak pada cara pandang individu atau pelaku UMKM terhadap kondisi keuangan perusahaan. Inklusi keuangan, di sisi lain, adalah sebuah proses yang digunakan lembaga keuangan formal untuk membantu masyarakat atau pelaku ekonomi lainnya dengan menjadikan mereka lebih mudah diakses, bermanfaat, dan tersedia. Tujuan inklusi keuangan adalah untuk mendorong sistem keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas. Pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat, stabilitas sistem keuangan, dan pembangunan ekonomi secara inklusif dapat dengan mudah tercapai melalui inklusi keuangan (Sufyati HS & Alvi Lestari, 2022)

Dalam Kusumaningtuti & Setiawan dalam Anisyah et al., (2021) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai segala inisiatif yang bertujuan untuk menghilangkan segala hambatan sehingga menggunakan gagasan berbiaya rendah untuk mengeksplorasi semua permasalahan yang muncul dalam akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Inklusi keuangan sangat dibutuhkan peranannya bagi pelaku UMKM untuk menyokong operasional usahanya dari segi permodalan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, agar kegiatan usaha yang dijalankannya dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan usahanya dalam jangka pendek maupun jangka panjang, para pelaku UMKM perlu memiliki pengetahuan mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan. Menurut penelitian Sanistasya et al., (2019), kinerja perusahaan kecil dipengaruhi secara signifikan oleh inklusi dan

literasi keuangan. Namun temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Dermawan (2019) yang tidak menemukan dampak nyata inklusi keuangan terhadap kelangsungan dan kinerja UMKM. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih detail bagaimana inklusi dan literasi keuangan mempengaruhi kinerja UMKM di Bangkalan Madura.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan konteks di atas, peneliti dapat merangkum pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Bangkalan Madura?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Bangkalan Madura?
3. Apakah literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Bangkalan Madura?

1.3 Batasan Masalah

Batasan pada penelitian ini yaitu penggunaan literasi keuangan dan inklusi keuangan sebagai variabel bebas dan penggunaan kinerja UMKM sebagai variabel terikat. Objek yang diteliti yaitu pelaku UMKM yang ada di daerah Bangkalan Madura.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independent yaitu literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap variabel dependent yaitu kinerja

UMKM di Bangkalan Madura. Artinya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan pelaku UMKM dan pengaruhnya terhadap kinerja UMKM, serta bagaimana inklusi keuangan mempengaruhi kinerja UMKM di Bangkalan Madura.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk menambah wawasan dan mengetahui lebih dalam mengenai pemahaman literasi keuangan, inklusi keuangan, dan kinerja UMKM.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk merencanakan strategi dalam proses akselerasi perkembangan kinerja UMKM dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan.

c. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya pemahaman tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan untuk keberlangsungan usahanya.